



Scripta Technica: Journal of Engineering and Applied Technology

Vol 1 No 2 Desember 2025, Hal. 324-332
ISSN:3110-0775(Print) ISSN: 3109-9696(Electronic)
Open Access: <https://scriptainteletektual.com/scripta-technica>

Sistem Aplikasi untuk Penyaluran Bantuan Bahan Pangan Menggunakan Aplikasi PGC (Pos Giro Cash)

Mohammad Rachel^{1*}

¹ Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia
email: mohammadrachel22@gmail.com

Article Info :

Received:
19-10-2025
Revised:
27-11-2025
Accepted:
30-12-2025

Abstract

PT Pos Indonesia (Persero) is a state-owned enterprise engaged in services, particularly communication and delivery services, as well as financial services through post offices. As a state-owned enterprise, PT Pos Indonesia is committed to maintaining public trust and providing optimal services to the government and the community. Post offices serve as a means for various transactions, such as sending letters and packages, paying bills, withdrawing money, and selling stamps. In supporting the distribution of social assistance, PT Pos Indonesia has developed the Pos Giro Cash application, which is used to document the homes of beneficiary families (KPM) of the Sembako Program. This application aims to minimize the risk of misdirected assistance by collecting and managing recipient data accurately. Social assistance is a form of government spending provided in the form of money, goods, or services to protect the community from social risks and improve welfare. One form of social assistance is food assistance, which aims to ensure that the community has access to sufficient and nutritious food. This application system was developed as a set of integrated elements to achieve the goal of targeted and effective assistance distribution.

Keywords: Application, PGC (Pos Giro Cash), Social Assistance, Food Assistance, System.

Abstrak

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa, khususnya layanan komunikasi dan pengiriman, serta layanan keuangan melalui Kantor Pos. Sebagai BUMN, PT Pos Indonesia berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memberikan pelayanan optimal kepada pemerintah dan masyarakat. Kantor Pos berfungsi sebagai sarana berbagai transaksi, seperti pengiriman surat dan paket, pembayaran tagihan, penarikan uang, serta penjualan prangko. Dalam mendukung penyaluran bantuan sosial, PT Pos Indonesia mengembangkan aplikasi Pos Giro Cash yang digunakan untuk mendokumentasikan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako. Aplikasi ini bertujuan meminimalkan risiko bantuan tidak tepat sasaran dengan mengumpulkan dan mengelola data penerima secara akurat. Bantuan sosial merupakan bentuk belanja pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu bentuknya adalah bantuan pangan, yang bertujuan menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Sistem aplikasi ini dibangun sebagai kesatuan unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan efektif.

Kata kunci: Aplikasi, PGC (Pos Giro Cash), Bantuan Sosial, Bantuan Bahan Pangan, Sistem.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami akselerasi yang sangat signifikan, terutama pada ranah teknologi komputer dan sistem informasi yang berperan besar dalam pengelolaan data dan distribusi informasi. Teknologi komputer telah membawa masyarakat memasuki era informasi yang ditandai oleh kemudahan akses, kecepatan pemrosesan, serta ketepatan penyajian data yang mendukung pengambilan keputusan. Informasi menjadi kebutuhan strategis dalam berbagai sektor kehidupan, baik pada aktivitas individu, organisasi, maupun institusi publik yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi yang efektif menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja dan kualitas layanan, termasuk dalam sektor pelayanan sosial dan distribusi bantuan pangan berbasis teknologi (Septiani et al., 2020).

Masih terdapat sejumlah usaha kecil, menengah, maupun lembaga pelayanan yang belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi digital dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Penyebaran informasi masih banyak dilakukan secara manual melalui komunikasi lisan atau terbatas

pada penggunaan media sosial yang belum terintegrasi secara sistematis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi, rendahnya literasi digital, serta anggapan bahwa pembangunan sistem informasi membutuhkan biaya besar dan proses yang kompleks. Pola kerja seperti ini berpotensi menghambat pengembangan organisasi serta membatasi jangkauan layanan kepada masyarakat yang lebih luas (Toiyo & Kainde, 2024).

Persepsi bahwa pengembangan sistem digital memerlukan sumber daya besar tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi teknologi saat ini yang semakin adaptif dan mudah diimplementasikan. Berbagai aplikasi mobile telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik secara praktis dan efisien tanpa memerlukan infrastruktur yang rumit. Aplikasi mobile mampu menjembatani kebutuhan pencatatan data, distribusi informasi, serta pemantauan kegiatan secara real time. Pemanfaatan teknologi aplikasi menjadi solusi strategis dalam meningkatkan akurasi data dan efektivitas pelayanan, khususnya pada sektor distribusi bantuan pangan dan perlindungan sosial (Hamid, 2022).

Salah satu inovasi teknologi yang dimanfaatkan dalam penyaluran bantuan pangan adalah aplikasi Pos Giro Cash (PGC) yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk merekam dan mengelola data rumah tangga penerima bantuan, khususnya Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam program bantuan pangan. Pencatatan data berbasis aplikasi memungkinkan proses verifikasi penerima dilakukan secara lebih terstruktur dan terkontrol. Kehadiran aplikasi PGC berkontribusi dalam menekan potensi kesalahan sasaran serta meningkatkan transparansi dalam distribusi bantuan sosial (Putri et al., 2024).

Penggunaan aplikasi PGC menjadi bagian dari strategi digitalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah. Aplikasi tersebut digunakan secara aktif dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang telah memenuhi kriteria dari Kementerian Sosial. Integrasi data penerima bantuan melalui sistem aplikasi memudahkan proses pemantauan serta evaluasi penyaluran bantuan di berbagai wilayah. Pemanfaatan sistem informasi ini sejalan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan bantuan sosial berbasis teknologi (Mulya & Yuliantini, 2023).

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, belanja bantuan sosial diklasifikasikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam bentuk penyaluran dana, barang, atau jasa kepada masyarakat. Tujuan utama dari bantuan sosial meliputi perlindungan dari risiko sosial, peningkatan kapasitas ekonomi, serta penguatan kesejahteraan kelompok rentan. Pengelolaan bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi prasyarat utama agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal (Dharmakarja, 2017; Agustina & Megawati, 2022).

Sistem dipahami sebagai sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan antar komponen dalam sistem menciptakan alur kerja yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem informasi berfungsi sebagai sarana pengolahan data menjadi informasi yang bernilai guna bagi pengambilan keputusan. Penerapan sistem yang terstruktur dalam penyaluran bantuan pangan mendukung keakuratan data dan konsistensi pelaksanaan program sosial (Fadlurrohman et al., 2019).

Kantor Pos sebagai institusi layanan publik memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi logistik dan layanan keuangan kepada masyarakat. Selain berfungsi sebagai pusat pengiriman surat dan paket, Kantor Pos juga menyediakan berbagai layanan keuangan yang menjangkau wilayah luas hingga daerah terpencil. Peran tersebut menjadikan Kantor Pos sebagai mitra penting dalam implementasi program bantuan pangan non tunai berbasis teknologi. Integrasi antara fungsi kelembagaan Kantor Pos dan sistem aplikasi PGC diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan serta memperkuat tata kelola pelayanan publik yang berbasis data dan teknologi (Mudzanatun et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang memadukan beberapa teknik pengumpulan dan analisis data untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai sistem aplikasi penyaluran bantuan pangan. Pendekatan studi kasus diterapkan untuk mengkaji secara mendalam implementasi aplikasi pada konteks tertentu, yang diperkuat melalui survei dan wawancara guna menggali persepsi serta pengalaman pengguna, penyedia layanan, dan pemangku kebijakan. Data pendukung diperoleh melalui analisis dokumen yang mencakup kebijakan, laporan evaluasi, serta

literatur terkait, sementara pemodelan, simulasi, dan studi eksperimental digunakan untuk menilai kinerja serta efektivitas fitur sistem dalam berbagai kondisi. Seluruh temuan kemudian dianalisis menggunakan kerangka SWOT serta pendekatan partisipatif agar mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan implementasi sistem aplikasi bantuan pangan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Aplikasi Penyaluran Bantuan Bahan Pangan Menggunakan Aplikasi PGC (Pos Giro Cash)

Penyaluran bantuan bahan pangan melalui PT Pos Indonesia merupakan bagian dari mekanisme perlindungan sosial yang dirancang untuk menjamin ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Alur penyaluran bantuan pangan pada umumnya diawali dengan proses identifikasi calon penerima bantuan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait berdasarkan data kesejahteraan sosial yang tersedia. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam validasi dan penetapan kebijakan bantuan. Proses ini menegaskan pentingnya integrasi data antarinstansi guna meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan pangan (Dharmakarja, 2017; Agustina & Megawati, 2022).

Setelah data calon penerima diterima, Kementerian Sosial melakukan verifikasi serta penentuan jumlah dan jenis bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat. Penetapan tersebut mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi penerima serta ketersediaan anggaran dan bahan pangan. Informasi yang telah ditetapkan kemudian diteruskan kepada PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur bantuan. Tahapan ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses kebijakan yang memerlukan koordinasi lintas lembaga secara sistematis (Fadlurrohimi et al., 2019; Rosita et al., 2024).

Peran PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan bahan pangan semakin diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi Pos Giro Cash yang berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pengendalian distribusi bantuan. Aplikasi ini memungkinkan pendataan penerima bantuan dilakukan secara digital, mulai dari identitas penerima, lokasi penyaluran, hingga status penerimaan bantuan. Sistem aplikasi memberikan kemudahan bagi petugas dalam memantau proses distribusi secara real time serta mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Implementasi aplikasi PGC menunjukkan transformasi layanan pos dari model konvensional menuju layanan publik berbasis teknologi informasi (Putri et al., 2024; Nurhidayah & Adiwati, 2025).

Sistem penyaluran bantuan bahan pangan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah sistem distribusi langsung yang banyak diterapkan melalui PT Pos Indonesia. Sistem ini menempatkan kantor pos atau titik layanan pos sebagai lokasi penyerahan bantuan kepada penerima. Model distribusi langsung dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh sistem distribusi lainnya. Keunggulan jaringan kantor pos yang tersebar luas menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan sistem ini (Wahyutomo et al., 2016; Putra et al., 2021).

Selain distribusi langsung, sistem voucher dan e-voucher juga menjadi alternatif dalam penyaluran bantuan pangan di berbagai daerah. Sistem voucher memberikan fleksibilitas kepada penerima bantuan untuk menukarkan bantuan pangan di mitra yang telah ditentukan. Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi voucher fisik menjadi e-voucher yang terintegrasi dengan aplikasi dan sistem pembayaran digital.

Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi distribusi serta memperkuat kontrol terhadap penggunaan bantuan (Toiyo & Kainde, 2024; Fitriani et al., 2025). Sebagai penguat analisis, berikut disajikan data perbandingan sistem penyaluran bantuan pangan berdasarkan temuan penelitian, laporan resmi, dan studi terdahulu yang relevan.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Penyaluran Bantuan Bahan Pangan Berbasis Konvensional dan Digital

Sistem Penyaluran	Karakteristik Utama	Sumber Data
Distribusi Langsung Pos	Penyerahan bantuan fisik melalui kantor pos dan petugas lapangan	Fadlurrohimi et al. (2019); Rosita et al. (2024)

Sistem Penyaluran	Karakteristik Utama	Sumber Data
Voucher Fisik	Penukaran bantuan di toko mitra dengan kupon bernilai tertentu	Agustina & Megawati (2022)
E-Voucher/Digital	Alokasi bantuan berbasis aplikasi dan saldo digital	Putri et al. (2024); Fitriani et al. (2025)
Aplikasi PGC	Pencatatan, verifikasi, dan monitoring penyaluran bantuan	Nurhidayah & Adiwati (2025); Hamid (2022)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa aplikasi PGC berfungsi sebagai instrumen pengendali yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem penyaluran bantuan pangan. Aplikasi ini tidak menggantikan seluruh mekanisme distribusi, tetapi memperkuat proses administrasi dan pengawasan. Integrasi sistem digital terbukti meningkatkan transparansi serta memudahkan proses evaluasi program bantuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya sistem informasi dalam tata kelola bantuan sosial berbasis data (Hamid, 2022; Septiani et al., 2020).

Penerapan aplikasi PGC juga berdampak pada kinerja pegawai PT Pos Indonesia yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan. Penggunaan sistem digital membantu mereduksi beban kerja administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Peningkatan efisiensi kerja berkontribusi terhadap kepuasan kerja pegawai dan kualitas layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan antara inovasi teknologi, manajemen kerja, dan performa organisasi layanan publik (Mulya & Yuliantini, 2023; Berutu & Zhafira, 2022).

Implementasi aplikasi berbasis giro pos dan layanan digital PT Pos Indonesia juga memperlihatkan konsistensi transformasi layanan dalam berbagai sektor, termasuk layanan pembayaran dan logistik. Studi terkait layanan Pos Giro Mobile dan Cash on Delivery menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pos mampu meningkatkan kecepatan transaksi dan kepercayaan pengguna. Keberhasilan tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan aplikasi PGC dalam penyaluran bantuan pangan. Integrasi layanan digital memperkuat posisi PT Pos Indonesia sebagai penyedia layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Rafisa et al., 2022; Ilham & Muzakir, 2022; Nisa et al., 2021).

Sistem aplikasi penyaluran bantuan bahan pangan menggunakan aplikasi PGC menunjukkan efektivitas dalam mendukung kebijakan bantuan sosial pemerintah. Alur penyaluran yang dimulai dari identifikasi penerima hingga distribusi bantuan dapat dikendalikan secara lebih terstruktur melalui sistem digital. Pemanfaatan aplikasi PGC memperkecil potensi penyimpangan, meningkatkan ketepatan sasaran, serta memperkuat akuntabilitas publik. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi sistem informasi dalam penyaluran bantuan pangan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dharmakarja, 2017; Putri et al., 2024; Ahmad et al., 2024).

Tinjauan Perusahaan dan Peran Kantor Pos Tegal dalam Penyaluran Bantuan Bahan Pangan Berbasis Aplikasi PGC

Kantor Pos Tegal merupakan salah satu unit layanan PT Pos Indonesia yang memiliki nilai historis sekaligus strategis dalam mendukung pelayanan publik, termasuk penyaluran bantuan bahan pangan. Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kota Tegal, kantor pos yang berlokasi di Jalan Proklamasi No. 2 Tegal telah berdiri sejak era 1860-an, beriringan dengan perkembangan awal layanan telegraf dan pos modern di Hindia Belanda. Layanan telegraf dibuka untuk publik pada tahun 1856 dan disusul layanan pos modern pada tahun 1862, menandai transformasi sistem komunikasi dan distribusi informasi pada masa itu. Sejarah panjang ini memperlihatkan bahwa institusi pos sejak awal dirancang sebagai infrastruktur penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Dharmakarja, 2017; Wahyutomo et al., 2016).

Perkembangan layanan pos di Tegal semakin nyata pada awal abad ke-20 dengan dibangunnya gedung Post Telegraafend Telefoon Dienst pada dekade 1930-an. Sebelum difungsikan sebagai kantor pos, bangunan tersebut sempat digunakan sebagai markas Angkatan Laut Belanda, yang mencerminkan nilai strategis lokasi dan bangunannya. Pada tahun 1954, gedung ini resmi diserahkan kepada Perusahaan Telepon dan Telegram untuk kembali dioperasikan sebagai kantor pos dan telegraf. Narasi

historis ini dapat diperkuat dengan melihat penyajian Gambar 1 Tampak Bangunan Kantor Pos Tegal untuk menunjukkan kontinuitas fungsi bangunan dari masa kolonial hingga saat ini.



Gambar 1. Tampak Bangunan Kantor Poa Tegal

Pada periode operasional awalnya, Kantor Pos Tegal melayani wilayah Brebes, Tegal, dan Pemalang, yang menunjukkan posisi Tegal sebagai kawasan urban yang berkembang dan menjadi simpul distribusi regional. Jangkauan layanan tersebut memperlihatkan bahwa kantor pos tidak hanya berfungsi sebagai titik pengiriman surat, tetapi juga sebagai pusat layanan administratif dan logistik. Arsitektur bangunan pos yang monumental mencerminkan gaya perkantoran kolonial yang dirancang adaptif terhadap iklim dan lingkungan setempat. Keberadaan fisik bangunan dengan luas sekitar 659 meter persegi di atas lahan kurang lebih 1.210 meter persegi memperkuat peran Kantor Pos Tegal sebagai infrastruktur publik jangka panjang (Wahyutomo et al., 2016; Rafisa et al., 2022).

Dalam kekinian, Kantor Pos Tegal merupakan bagian integral dari PT Pos Indonesia (Persero) yang menjalankan fungsi ganda sebagai entitas bisnis dan institusi sosial. Tujuan utama PT Pos Indonesia adalah memperoleh keuntungan guna menjaga keberlanjutan usaha, sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat luas sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dualisme fungsi ini menuntut pengelolaan organisasi yang proporsional antara orientasi profit dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menempatkan Kantor Pos Tegal sebagai unit kerja yang strategis dalam pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah, termasuk bantuan bahan pangan (Mulya & Yuliantini, 2023; Rosita et al., 2024).

Kegiatan umum Kantor Pos Tegal mencakup penerimaan dan pemrosesan surat serta paket, penyediaan layanan keuangan, pengelolaan kotak surat, hingga distribusi bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai dan bantuan pangan. Layanan keuangan yang disediakan meliputi pembayaran tagihan, pengiriman uang, transaksi valuta asing, serta penempatan dan penarikan deposito. Ragam layanan ini memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya Kantor Pos dalam mengelola transaksi massal dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam implementasi sistem penyaluran bantuan pangan berbasis aplikasi PGC (Hamid, 2022; Khoiriyah, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Pos Giro Cash memperkuat fungsi Kantor Pos Tegal dalam menyalurkan bantuan bahan pangan secara terkontrol dan terdokumentasi. Aplikasi PGC memungkinkan pencatatan data penerima bantuan, verifikasi identitas, serta pelacakan status penyaluran secara sistematis. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan meminimalkan potensi kesalahan administratif.

Efektivitas penggunaan aplikasi PGC dalam penyaluran bantuan pangan telah dibuktikan dalam berbagai penelitian empiris di lingkungan PT Pos Indonesia (Putri et al., 2024; Nurhidayah & Adiwati, 2025). Sebagai penguat analisis, berikut disajikan tabel yang merangkum peran Kantor Pos dan dukungan sistem digital dalam penyaluran bantuan pangan berdasarkan temuan penelitian, laporan resmi, dan studi terdahulu.

Tabel 2. Peran Kantor Pos dan Sistem Digital dalam Penyaluran Bantuan Bahan Pangan

Aspek	Deskripsi	Sumber
Infrastruktur Fisik	Jaringan kantor pos dan bangunan bersejarah sebagai titik layanan	Wahyutomo et al. (2016)
Layanan Keuangan	Pembayaran, pengiriman uang, dan transaksi massal	Khoiriyah (2023); Nisa et al. (2021)
Sistem Digital	Aplikasi Pos Giro Cash untuk pencatatan dan monitoring	Putri et al. (2024); Nurhidayah & Adiwati (2025)
Program Sosial	Penyaluran BLT dan bantuan pangan non tunai	Fadlurrohim et al. (2019); Rosita et al. (2024)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pos Tegal memiliki kesiapan struktural dan sistemik dalam mendukung penyaluran bantuan pangan berbasis aplikasi. Integrasi antara infrastruktur fisik, layanan keuangan, dan sistem digital menciptakan ekosistem pelayanan yang saling melengkapi. Pendekatan ini sejalan dengan pengembangan platform digital berbasis giropos yang mendorong inovasi pelayanan publik pada masa krisis dan pascakrisis. Kesiapan tersebut menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan (Putra et al., 2021; Septiani et al., 2020).

Dari kebijakan sosial, keterlibatan Kantor Pos dalam penyaluran bantuan pangan mendukung tujuan perlindungan masyarakat dari risiko sosial dan kerentanan ekonomi. Bantuan pangan merupakan bagian dari belanja bantuan sosial yang dirancang untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan rumah tangga penerima. Sistem penyaluran yang terstruktur dan berbasis aplikasi memperkuat efektivitas kebijakan tersebut di tingkat implementasi. Hal ini sejalan dengan temuan evaluatif terkait program bantuan pangan non tunai di berbagai daerah (Dharmakarja, 2017; Agustina & Megawati, 2022).

Digitalisasi layanan pos juga berkorelasi dengan peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan. Penelitian mengenai layanan Pos Giro Mobile, Pospay, serta sistem Cash on Delivery menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi proses dan kepercayaan pengguna. Pengalaman tersebut menjadi landasan penting bagi penerapan aplikasi PGC dalam skala penyaluran bantuan pangan. Konsistensi inovasi digital memperlihatkan kesiapan PT Pos Indonesia dalam menjawab tuntutan pelayanan publik modern (Ilham & Muzakir, 2022; Rafisa et al., 2022; Ahmad et al., 2024).

Kantor Pos Tegal tidak hanya memiliki nilai historis sebagai peninggalan kolonial, tetapi juga berperan aktif dalam sistem penyaluran bantuan bahan pangan berbasis teknologi. Dukungan infrastruktur, pengalaman layanan keuangan, serta implementasi aplikasi PGC menjadikan kantor pos sebagai simpul distribusi yang andal. Integrasi fungsi sosial dan bisnis memungkinkan penyaluran bantuan berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa Kantor Pos Tegal merupakan aktor penting dalam penguatan tata kelola bantuan pangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem informasi modern (Putri et al., 2024; Fitriani et al., 2025; Mudzanatun et al., 2019).

Tahapan Penyaluran Bantuan Bahan Pangan Berbasis Aplikasi Pos Giro Cash (PGC)

Penyaluran bantuan bahan pangan berbasis aplikasi Pos Giro Cash merupakan bentuk transformasi tata kelola bantuan sosial yang menekankan akurasi data, transparansi proses, serta efisiensi layanan publik. Sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan klasik dalam penyaluran bantuan pangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, dan lemahnya pengawasan administratif. Digitalisasi melalui aplikasi PGC memungkinkan integrasi data antara pemerintah, PT Pos Indonesia, dan penerima bantuan secara terstruktur. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan reformasi belanja bantuan sosial yang menuntut akuntabilitas dan efektivitas program perlindungan sosial (Dharmakarja, 2017; Agustina & Megawati, 2022).

Tahap awal dalam sistem ini dimulai dari proses pendaftaran penerima bantuan yang dilakukan melalui aplikasi Pos Giro Cash. Calon penerima bantuan mengisi formulir registrasi yang memuat data

identitas, alamat, serta informasi pendukung sesuai kriteria kelayakan yang ditetapkan pemerintah. Proses pendaftaran berbasis aplikasi ini mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan mempermudah pengumpulan data dalam jumlah besar. Model pendaftaran digital terbukti mampu meningkatkan kelengkapan dan konsistensi data penerima bantuan (Hamid, 2022; Septiani et al., 2020).

Setelah proses pendaftaran, tahapan berikutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh tim yang berwenang. Data pendaftar diperiksa kesesuaiannya dengan basis data kependudukan dan kriteria program bantuan pangan yang berlaku. Verifikasi ini berfungsi sebagai instrumen penyaringan awal untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan. Mekanisme validasi berbasis sistem informasi terbukti mampu menekan potensi duplikasi dan penyimpangan data penerima manfaat (Fadlurrohman et al., 2019; Rosita et al., 2024).

Tahap pengesahan kelayakan dilakukan setelah data penerima dinyatakan valid oleh sistem dan petugas verifikasi. Aplikasi PGC secara otomatis mengklasifikasikan penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Proses pengambilan keputusan berbasis sistem ini mempercepat penetapan daftar Keluarga Penerima Manfaat tanpa mengurangi aspek kehati-hatian. Penggunaan algoritma sederhana dalam aplikasi memperkuat objektivitas penentuan kelayakan penerima bantuan (Putri et al., 2024; Nurhidayah & Adiwati, 2025).

Setelah kelayakan penerima ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pengalokasian dana bantuan ke akun Pos Giro Cash milik penerima. Dana bantuan dicatat secara digital dan hanya dapat digunakan untuk transaksi pembelian bahan pangan yang telah ditentukan. Sistem non tunai ini dirancang untuk memastikan bahwa dana bantuan tidak disalahgunakan untuk keperluan di luar program. Skema pengalokasian dana berbasis akun digital terbukti meningkatkan pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan program bantuan sosial (Khoiriyah, 2023; Berutu & Zhafira, 2022).

Sebagai bentuk transparansi layanan, penerima bantuan akan memperoleh pemberitahuan resmi melalui aplikasi PGC mengenai ketersediaan dana bantuan. Informasi yang disampaikan mencakup besaran dana, periode penggunaan, serta daftar pedagang atau toko pangan yang terdaftar. Notifikasi digital ini mengurangi ketergantungan pada informasi lisan dan meminimalkan kesalahan komunikasi antara penyelenggara dan penerima bantuan. Sistem pemberitahuan berbasis aplikasi meningkatkan kepercayaan penerima terhadap mekanisme penyaluran bantuan (Rafisa et al., 2022; Putra et al., 2021).

Tahap pemilihan dan pembelian bahan pangan menjadi inti dari implementasi bantuan pangan non tunai berbasis aplikasi. Penerima bantuan dapat memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhan dari pedagang yang telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Proses transaksi dilakukan secara langsung melalui aplikasi menggunakan saldo dana bantuan yang tersedia. Model ini mendorong fleksibilitas penerima sekaligus menjaga kendali program terhadap jenis komoditas yang dibeli (Toiyo & Kainde, 2024; Mudzanatun et al., 2019).

Setelah transaksi pembelian dilakukan, bahan pangan disiapkan untuk dikirimkan atau diambil langsung oleh penerima bantuan sesuai pilihan yang tersedia. Mekanisme distribusi ini memanfaatkan jaringan logistik PT Pos Indonesia yang telah menjangkau wilayah perkotaan hingga perdesaan. Ketersediaan opsi pengiriman dan pengambilan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi penerima dengan kondisi geografis yang beragam.

Pemanfaatan jaringan pos sebagai sarana distribusi terbukti efektif dalam mendukung program bantuan pangan berskala luas (Wahyutomo et al., 2016; Ilham & Muzakir, 2022). Sebagai penguat analisis tahapan penyaluran, berikut disajikan data ringkas yang menggambarkan fungsi setiap tahap berdasarkan laporan resmi, penelitian terdahulu, dan pengamatan peneliti.

Tabel 3. Tahapan Penyaluran Bantuan Bahan Pangan Berbasis Aplikasi PGC

Tahapan	Fungsi Utama	Sumber
Pendaftaran Digital	Pengumpulan data penerima bantuan	Hamid (2022); Septiani et al. (2020)
Verifikasi & Validasi	Penyaringan dan akurasi data	Fadlurrohman et al. (2019)
Pengesahan Kelayakan	Penetapan KPM berbasis sistem	Putri et al. (2024)

Tahapan	Fungsi Utama	Sumber
Pengalokasian Dana	Pengendalian penggunaan bantuan	Khoiriyah (2023)
Transaksi & Distribusi	Pemenuhan kebutuhan pangan	Nurhidayah & Adiwati (2025); Rosita et al. (2024)

Tahap akhir dalam sistem penyaluran bantuan pangan melalui aplikasi PGC adalah konfirmasi penerimaan, pemantauan, dan evaluasi program. Penerima bantuan diwajibkan melakukan konfirmasi digital setelah menerima bahan pangan sebagai bukti penyelesaian transaksi. Tim pengelola program secara berkala memantau data transaksi untuk menilai efektivitas, kepatuhan, dan potensi kendala di lapangan. Evaluasi berkelanjutan menjadi dasar perbaikan sistem agar penyaluran bantuan pangan semakin tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dharmakarja, 2017; Fitriani et al., 2025; Mulya & Yuliantini, 2023).

KESIMPULAN

Aplikasi PGC merupakan aplikasi penting untuk melakukan pembayaran dan pembagian bantuan bahan pangan melalui kantor pos. Aplikasi PGC juga memuat informasi yang lengkap dan akurat, termasuk nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima bantuan bahan pangan. Fungsi utama aplikasi PGC adalah sebagai bentuk aplikasi pengiriman dan untuk mempermudah proses pembagian bantuan bahan pangan dan barang. Aplikasi ini memastikan bahwa barang sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu. Adanya aplikasi PGC, proses administrasi pengiriman barang bantuan bahan pangan menjadi tertera dan terkontrol, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Dalam melakukan pengiriman bantuan bahan pangan pada kantor pos tetap diperlukan aplikasi PGC (Pos Giro Cash), Aplikasi PGC adalah aplikasi yang digunakan dan dikelola oleh pemerintah untuk penanggulangan, kerawanan pangan, dan untuk memenuhi kesepakatan kerja sama internasional serta keperluan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 175-190. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p175-190>.
- Ahmad, Z. I., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2214-2223. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13561>.
- Berutu, R., & Zhafira, N. H. (2022). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Pos Indonesia (Persero). *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(2), 202-211. <https://doi.org/10.57251/reg.v2i2.660>.
- Dharmakarja, Ima. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. *Substansi*, 1(2), 373-389. <https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.258>.
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, 9(2), 122-129. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>.
- Fitriani, S., Hilmawan, R. G., Yulianti, R., & Sumartini, E. (2025, May). Kawal Gizi: Pengelolaan Bantuan Pangan Pemerintah Berbasis Sig Di Lokus Stunting Kabupaten Tasikmalaya. In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 6, No. 2, pp. 595-604). <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v6i2.5848>.
- Hamid, A. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pelacakan Kpm Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pada Pt. Pos Indonesia Bogor. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(6), 333-346. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i6.615>.
- Ilham, M. F. N., & Muzakir, M. F. A. (2022). Cash on delivery: Penerapan Pada PT. POS Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 19(2), 246-258. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol19.iss2.art5>.

- Khoiriyah, J. U. (2023). Pengendalian Intern Pendapatan Pada Layanan Jasa Pospay Loker PT Pos Indonesia KCU Jember. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 5(3), 172-185. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i3.1788>.
- Mudzanatun, M., Fajriyah, K., & Muflihah, I. (2019). Aplikasi Teknologi Pangan dalam Pengolahan Potensi Lokal Umbi-Umbian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 3(1), 18-31. <https://doi.org/10.20956/pa.v3i1.5004>.
- Mulya, W. D. H., & Yulianti, T. (2023). Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di PT Pos Indonesia (PERSERO) Cabang Fatmawati. *Ilmu dan Budaya*, 44(2), 82-93. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2628>.
- Nisa, S. P., Bisri, M. H., & Sa'adah, N. (2021). Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 271-284. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4492.
- Nurhidayah, U., & Adiwati, M. R. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pos Giro Cash PT Pos Indonesia KCU Surabaya 60000 pada Penyaluran Bantuan Pangan Tahap III. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1626-1630. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7074>.
- Putra, R. D., Mulyana, N., & Atika, D. (2021). Platform Digital Berbasis Giropos: Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Covid-19 (Studi Di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 361-376. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.105>.
- Putri, A. S., Purwanti, D., & Basori, Y. F. F. (2024). Implementation Of Distribution Of Non-Cash Food Assistance Through The Cash Giro Pos Application. *Dia: Jurnal Administrasi Publik*, 22(01), 208-218. <https://doi.org/10.30996/dia.v22i01.8679>.
- Rafisa, A. W., Al-Fauziah, H. S., & Nurbaiti, N. (2022). Influence of Pos Giro Mobile (PGM) in Running the Service Process of PT. Pos Indonesia (Case Study at Padangsidimpuan Post Office). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 103-109. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i1.381>.
- Rosita, A., Sholih, S., & Siregar, H. (2024). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Jambura Journal of Community Empowerment*, 75-79. <https://doi.org/10.37411/jjce.v5i1.2955>.
- Septiani, A. P., Junardi, W., Amaliah, A., Bachtiar, A., Mahendra, J. I., & Muttaqin, M. I. (2020). Sistem Informasi Desa Siaga Pangan Menghadapi Covid19 berbasis Web Service. *Jurnal Sistem Cerdas*, 3(3), 231-240. <https://doi.org/10.37396/jsc.v3i3.63>.
- Toiyo, I. G., & Kainde, Q. (2024). Aplikasi Pelayanan dan Informasi Mengenai Bahan Pangan Di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Minahasa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 8581-8590. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8401>.
- Wahyutomo, P. K., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2016). Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Persebaran Kantor Pos Di Kota Semarang Dengan Google Maps Api. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(3), 70-80. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2016.12824>.